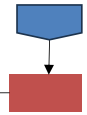
KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO HUKUM, KOMUNIKASI PUBLIK DAN KERJA SAMA**	**NOMOR SOP**	**SEK-OT.02.02-201**
	TANGGAL PEMBUATAN	**20 AGUSTUS 2025**
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	**3 NOVEMBER 2025**
	DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL**  **NICO AFINTA**
	NAMA SOP :	**KOORDINASI DAN FASILITASI KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI XIII DPR RI**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 2 Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249); 3 Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351); 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5 Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832); 6 Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912).	1. Memiliki pengetahuan terkait hukum tata negara; 2. Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan pihak terkait.
KETERKAITAN:	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
	1. Komputer/Printer 2. Jaringan internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Tata Naskah Dinas 5. ATK
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses koordinasi dan fasilitasi kunjungan kerja oleh DPR RI di lingkungan Kementerian Hukum kurang optimal	Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KOORDINASI DAN FASILITASI KUNJUNGAN KERJA KOMISI XIII DPR RI

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Menteri	Sekretaris Jenderal	Pimti Madya dan Pratama UKE I, Staf Ahli, Staf Khusus	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama	Penghubung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kementerian Hukum menerima Surat Undangan Kunjungan Kerja dari Wakil Ketua Pimpinan DPR RI	MULAI						Surat undangan Kunjungan Kerja dari Wakil Ketua Pimpinan DPR RI	2 hari	Disposisi Menteri	
2	Disposisi Menteri Hukum terkait Surat Undangan Kunjungan Kerja dari Wakil Ketua Pimpinan DPR RI							- Disposisi Menteri - Surat undangan Kunjungan Kerja dari Wakil Ketua Pimpinan DPR RI	1 hari	Disposisi Sekretaris Jenderal	
3	Disposisi Sekretaris Jenderal terkait pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI kepada Pimpinan Tinggi Madya							- Disposisi Sekretaris Jenderal - Surat undangan Kunjungan Kerja dari Wakil Ketua Pimpinan DPR RI	1 hari	Disposisi Sekretaris Jenderal	
4	Penyampaian surat Sekretaris Jenderal ke Kepala Kantor Wilayah terkait kegiatan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI							Surat Sekretaris Jenderal	2 hari	Surat Sekretaris Jenderal	
5	Disposisi Bapak Sekretaris Jenderal kepada Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama terkait pendampingan kegiatan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI							- Disposisi Sekretaris Jenderal - Surat undangan Kunjungan Kerja dari Wakil Ketua Pimpinan DPR RI	1 hari	Laporan	
6	Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama melaksanakan rapat koordinasi persiapan kegiatan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kepala Kantor Wilayah terkait							Surat Undangan Rapat Persiapan	1 hari	Laporan	
7	Pelaksanaan pendampingan kegiatan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI							- Bahan Kunjungan Kerja	1 hari	Laporan	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		Menteri	Sekretaris Jenderal	Pimti Madya dan Pratama UKE I, Staf Ahli, Staf Khusus	Kepala Kantor Wilayah	Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama	Penghubung	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Penyusunan laporan kegiatan Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI		SELESAI					- Laporan Kunjungan Kerja	3 hari	Laporan	
	TOTAL WAKTU										